

bulletin bpk sdm

Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia
Departemen Pekerjaan Umum



Geliat Pembangunan Infrastruktur Di Negeri Serambi Mekah

4 Reformasi Diri Lembaga
Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional

12 Menggapai Totalitas
Pembangunan Konstruksi di
Kepulauan Riau

D a f t a r I s i

Reformasi Diri Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	4
Geliat Pembangunan Infrastruktur Di Negeri Serambi Mekah	6
Silih Berganti Eselon II, III serta Balai dilingkungan BPKSDM	11
Menggapai Totalitas Pembangunan Konstruksi di Kepulauan Riau	12
Good Governance Dalam Perspektif Islam	14
Motivasi Motif	16

D a r i R e d a k s i



Bagaimana menjadi profesional adalah salah satu renungan yang perlu dicermati di bulan Agustus ini.

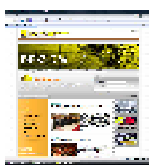
Menginjak 62 tahun Indonesia merdeka, mari bersama kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri demi bangsa kita.

Persaingan global, derasnya arus informasi & teknologi menuntut kita bergerak cepat dan akurat tanpa melupakan kualitas karya yang tercipta, khususnya sebagai Badan Pembina Konstruksi dan Sumber Daya Manusia.

Dalam buletin edisi ke-4 ini, dihadirkan artikel yang memuat reformasi LPJK Nasional, pergantian personil di Dept. PU dan Good Governance dalam Perspektif Islam demi meningkatnya kinerja khususnya dalam Konstruksi Indonesia. Ditampilkan juga Rubrik Indonesia yang memuat perkembangan dari DI Aceh dan Riau, serta artikel lainnya yang memuat kiprah pekerja dalam beraktivitas.

Selain itu kami mengundang partisipasi pembaca dalam interaksi dengan tim redaksi melalui email maupun berpartisipasi dalam Konstruksi Indonesia 2007 yang akan segera diselenggarakan. Mari kita membangun untuk kesejahteraan bersama. Merdeka!

S u r a t P e m b a c a



Tim redaksi bulletin yang terhormat,
Bagaimana cara untuk mendapatkan bulletin BPKSDM secara rutin ?
Terima kasih sebelumnya.
Diana
Jakarta

Tim redaksi,
Dapatkah saya dibantu untuk mendapatkan referensi lengkap tentang jasa konstruksi?
Budi
Bandung

Pembina/Pelindung : Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia;

Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia; **Wakil Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; **Pemimpin Redaksi** : Surtiningsih;

Redaksi Pelaksana : Nanan Abidin; **Anggota Redaksi** : Doedoeng Z. Arifin, Bambang Soekaryatno, Eddy Sunyoto, Sari Mustika, Yaya Supriyatna, Ero, Cakra Nagara, Agnes S.P. Trisnowati, Titik Murti Utami, Subagio, Yanto Apriyanto, Sri Yuliawati, Madya Gunawan, Agus Firngadi, Sugeng Sunyoto, Krisnawati Pratiwi Hadi, Meylina Hasbullah;

Administrasi dan Distribusi : Agus Kurniawan, **Desain/Tata letak** : Nanang Supriyadi **Photografer** : Sri Bagus Herutomo

Teknologi Audit Forensik, Repair dan Retrofit untuk Rumah & Bangunan Gedung



oleh **Syafei Amri**

Yayasan John Hi-Tech
Idetama, 2006
Lv, 245 hlm.; 25 cm

Bangunan pada dasarnya didirikan untuk melindungi manusia dan memberikan fasilitas kemudahan untuk menjalankan hubungan dan memperlancar roda aktifitas sehari-hari. Semakin tinggi kualitas bangunan yang dimiliki oleh suatu bangsa, merupakan identifikasi tingginya kemajuan yang dicapai oleh bangsa tersebut. Kriteria mendirikan bangunan haruslah aman, nyaman dan harga yang realistis. Timbulnya kegagalan bangunan yang ada, umumnya diakibatkan oleh permasalahan dalam hal 1. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (phase konstruksi) 2. Perubahan fungsi, bencana alam, kebakaran (phase paska konstruksi). Dibahas lebih lanjut disini mengenai perilaku alam yang sangat mempengaruhi kondisi bangunan (cuaca, geologi, geografi, tumbuh-tumbuhan, fauna); jenis, tipe, system, fungsi bangunan dan komponennya; beban dan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan; konsep pemeliharaan dan perbaikan bangunan; sifat-sifat dasar bahan bangunan dan permasalahannya; dan teknologi perbaikan kerusakan bangunan. Selanjutnya juga diulas tentang teknik perbaikan dalam kasus-kasus konstruksi beton dan konstruksi baja. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam pemeriksaan dan perbaikan dalam komponen non-struktur dan komponen arsitektur. Buku ini dilengkapi dengan daftar notasi, daftar istilah, gambar dan foto yang berkaitan.

(R. Sulistyowati)

Quote Quotes

- *Kebanggaan kita yang terbesar bukanlah karena tidak pernah gagal, tetapi bisa bangkit kembali pada waktu kita jatuh. (Kong Fu Ste)*
- *Kesempatan hanya menantikan orang yang siap dan giat. (Abraham Lincoln)*

Subscribe



Bulletin BPKSDM mengupas tentang Konstruksi Indonesia. Untuk berlangganan atau hendak menjadi kontributor, dapat menghubungi :

Tim Redaksi Bulletin BPKSDM Dep. PU
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Telp : (021)7266639
Email : datinfo25@yahoo.com
http ://bpksdm.pu.go.id

Perjalanan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) telah sampai pada babak

baru. Lembaga yang bertugas mengawasi berjalannya sektor konstruksi di Indonesia ini baru saja me-'reformasi' diri untuk menjadi sebuah lembaga yang benar-benar mampu mengayomi jasa konstruksi Indonesia. Reformasi ini dibuktikan melalui langkah-langkah perubahan internal dan berpuncak pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di penghujung bulan Juli 2007 di Jakarta.

Alasan mengapa LPJK perlu mereformasi diri, bisa dilihat dari masukan yang datang dari berbagai pihak sejak Mukernas tahun 2006 terkait dengan masalah perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU), internal asosiasi perusahaan, pembentukan asosiasi baru yang belum diakreditasi, dan perbedaan antara kualifikasi SBU dengan ketentuan pasar serta penerbitan Daftar Registrasi Perusahaan (DRP) yang diharapkan mampu ditangani LPJK.

Menteri Pekerjaan Umum sendiri secara khusus meminta LPJK untuk mampu mengakomodir kepentingan jasa konstruksi Indonesia yang beragam. Misalnya mengenai sosialisasi penerbitan Daftar Registrasi Perusahaan (DRP) oleh Pemprov yang telah diatur oleh LPJKN/LPJK tahun 2005 serta Surat Menteri PU yang ditujukan kepada para Gubernur, dan rencana kerja yang tengah dipersiapkan LPJK untuk menyempurnakan ketentuan registrasi dan akreditasi sehingga awal Januari tahun depan SBU yang baru bisa diberlakukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai pengelompokan bidang usaha yang harus mengacu pada *Central Product Classification* (CPC) terkait kondisi usaha jasa konstruksi supaya dalam penerapannya tidak menimbulkan permasalahan.

Salah satu tugas LPJK yang tak kalah penting adalah mendorong jasa konstruksi Indonesia agar mampu bersaing tak hanya

Reformasi Diri Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional



di kandang sendiri tapi juga di luar negeri. Dalam hal ini LPJK telah mulai merintisnya dengan terlibat dalam proses perundingan liberalisasi perdagangan khususnya di bidang jasa konstruksi, baik melalui WTO, APEC, Coordinating Committee on Services (CCS) Asean, maupun Indonesia-Japan Economic Partnership Agreements (IJ-EPA). Menteri PU secara khusus mengharapkan LPJK tetap aktif memberikan masukan dan mengikuti perundingan-perundingan lanjutan seperti penyusunan *Mutual Recognition Agreements* (MRA) profesi Arsitektur serta materi liberalisasi sektor bisnis dan konstruksi.

Usaha LPJK dan jasa konstruksi nasional melalui perundingan-perundingan bertaraf internasional mau tidak mau harus terus dilakukan, sebab ini menjadi cara untuk menghadapi serbuan kontraktor/konsultan asing ke pasar konstruksi nasional. Dengan adanya kondisi seperti ini yang dapat dilakukan oleh pengusaha konstruksi kita adalah mempersiapkan diri dan membentuk kelembagaan yang kuat guna menghadapi persaingan global. Apalagi

dengan adanya rencana pemerintah di Tahun 2008 menaikkan anggaran infrastruktur bidang konstruksi sebesar 1,5 kali lipat dari tahun 2007. Disisi lain pasar konstruksi luar negeri juga terbuka lebar bagi kontraktor dalam negeri.

Untuk itu Mukernas akan membahas isu-isu strategis tentang perkembangan ditingkat nasional, regional maupun internasional serta mencari solusi terbaik dalam menghadapi perkembangan tantangan itu. Saat ini, dikatakan mantan Ketua Umum LPJK Sulistijo Sidharto Mulyo, anggota Dewan Pengurus (DP) LPJKN telah diperkuat oleh wakil-wakil dari unsur pemerintah seperti Bappenas, Depdagri, Depnakertrans, Departemen Energi dan SDM serta BKPM. Penambahan anggota ini dapat diikuti oleh LPJKD sehingga eksistensi lembaga menjadi semakin kuat.

Berkaitan dengan SBU Jasa Konsultansi Perencanaan dan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nasional telah diperpanjang hingga akhir tahun 2006. Demikian pula SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional serta akreditasi



asosiasi perusahaan jasa konstruksi. Menurutnya, pihaknya telah lama akan mengganti ketentuan akreditasi, sertifikasi dan registrasi yang saat ini berlaku. Hal itu dibuktikan adanya Keputusan Dewan LPJKN No.75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi BU Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.

Untuk mengatasi masalah banyaknya keluhan dan keberatan dari para pemilik BU yang berkualifikasi kecil (K3) dan M (Menengah) tentang pemberlakuan pelaksanaan kualifikasi kompetensi BUKK terhitung 1 Januari 2006, dalam waktu dekat pihak LPJK akan melakukan perubahan atas keputusan DP LPJKN tersebut. Untuk beberapa asosiasi yang bermasalah LPJK tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan. Mengingat saat ini terdapat sekitar 96.000 kontraktor dan 5.000 konsultan yang bergerak di bidang jasa konstruksi maka upaya-upaya peningkatan seperti kinerja badan usaha, SDM, dan kerjasama perlu diwujudkan baik ditingkat nasional, regional maupun internasional untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi Indonesia bisa meningkat.

Melalui Mukernas LPJK 2007 yang berlangsung selama dua hari ini, Menteri PU berharap secara khusus kepada LPJKN untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi kontraktor nasional. Hal ini sangat penting untuk memenangi persaingan yang semakin berat. Pemerintah berharap pasar konstruksi dalam negeri tetap dikuasai kontraktor lokal

disamping merebut pasar luar negeri. Selain mengurus masalah sertifikasi, LPJK di masa mendatang dituntut mampu menciptakan kontraktor profesional yang mumpuni.

Pasar konstruksi dalam negeri harus terus tumbuh oleh sebab itu peran kontraktor semakin tinggi. Pemerintah berharap agar kontraktor lokal tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seiring semakin besarnya nilai anggaran pemerintah yang menuntut kemampuan yang cukup dari kontraktor lokal. Salah satu contoh nyatanya, mampukah tender dengan tata pemerintahan yang baik mampu pula menghasilkan pembangunan yang baik pula?

Terkait dengan penyiapan konstruksi nasional ke depan, Sulistijo Sidharto Mulyo selaku mantan Ketua Umum LPJKN berharap pemerintah segera menyelesaikan PP 28, 29 dan 30 tahun 2005, mengingat PP tersebut menjadi rujukan pengembangan jasa konstruksi nasional. Apalagi mengingat ke depan pengembangan jasa konstruksi nasional akan menghadapi permasalahan dan tantangan yang semakin berat terkait kompetensi SDM konstruksi, pengembangan teknologi, perkuatan permodalan, pemutakhiran model bisnis, dan *quality assurance* yang diminta pasar. Salah satu pokok penting Mukernas LPJK 2007 yang tidak kalah penting adalah pemilihan pengurus lembaga yang berdedikasi tinggi dan yang mampu bekerja secara profesional. Sejalan dengan hal tersebut itu Menteri PU

berpesan agar pengurus baru yang terpilih dengan ikhlas mengesampingkan kepentingan individu maupun kelompok demi kemajuan dunia konstruksi Indonesia. Penyelenggaraan Munas LPJK juga diagendakan untuk melaksanakan pemaparan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus LPJK 2003-2007, pembentukan kepengurusan baru dan penyusunan rencana kerja periode berikutnya LPJK 2007-2011.

Melalui musyawarah yang berlangsung selama dua

hari (31 Juli – 01 Agustus 2007) didapatkan pengurus baru LPJKN masa bakti 2007-2011 sebagai berikut, M. Malkan Amin sebagai Ketua Umum; Dadan Krisnandar sebagai Sekretaris Umum; Sarwono Hardjomuljadi sebagai Ketua Bidang Libang, Mediasi, Arbitrase, Penilai Ahli; Agus Rahardjo sebagai Ketua Bidang Registrasi; Bachiar Ravenala Ujung sebagai Ketua Bidang Perusahaan; Poernomo Soekirno sebagai Ketua Bidang Pendidikan & Pelatihan; sedangkan Akhmad Suraji dan Dharma Sjahrial Pohan sebagai Sekretaris.

Sebagai Anggota : Bachtiar Siradjudin, Darma Tyanto S., Omar Samuel Ichwan, Wayan Darsana, Sjahedi Junardiono, Jimmy S. Juwana, Junjungan Pasaribu, Asrizal Tatang, Bambang Soemardiono, H. Musliikh, Haryanto, Suprayitno, A. Sirajudin Nonci, Abdul Wahab Bangkora, Made Dharma Hartana, Monang Sinambela, Suwandi Saputro, Tri Djoko Waluyo, Garwono Winardi Surarso, Chudry Sitompul, Eddy Eko Susilo, John Paulus Pantouw, Sampurna Sitepu dan Bambang Widiyanto. Diharapkan dari kepengurusan yang baru diharapkan tercipta kontraktor handal yang mampu bersaing dengan kontraktor asing dan merebut pasar manca negara dan menjadi kebanggaan di negara sendiri. ♦ (tw/rn)

Diambil dan diolah dari sumber www.pu.go.id dengan artikel berjudul "Menteri PU Minta LPJK Sempurnakan Ketentuan Registrasi dan Akreditasi" dan "Menteri PU Harapkan Kontraktor Lokal Tetap Kuasai Pasar Konstruksi Dalam Negeri"



Geliat Pembangunan Infrastruktur Di Negeri Serambi Mekah

Negeri serambi mekah, propinsi paling ujung barat Indonesia kini mulai bangkit membangun kembali. Sebagaimana diketahui, bencana besar gempa bumi diikuti gelombang tsunami pada akhir tahun 2004 lalu telah memporak-porandakan sebagian wilayah bagian barat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), mengakibatkan hampir seluruh sendi kehidupan di propinsi ini lumpuh, termasuk infrastruktur. Hampir 50 % bangunan yang ada di wilayah barat NAD rusak total dan kerusakan infrastruktur mencapai 70 % lebih. Secara otomatis pembangunan di NAD terhenti, mengingat sarana dan prasarana pendukungnya rusak.

Kini setelah tiga tahun berlalu, geliat pembangunan mulai terlihat di berbagai penjuru bumi Serambi Mekah. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur, berbagai pekerjaan konstruksi mulai terlihat seperti pembangunan perumahan, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Tersedianya kembali infrastruktur yang menjadi sarana dan prasarana pembangunan mengiringi kembalinya gerak perekonomian di NAD. Meski gerak laju perekonomian mulai pulih dan pembangunan infrastruktur juga telah berjalan kembali, pengawasan dan kontrol terhadap pekerjaan konstruksi harus tetap dilaksanakan untuk menjamin kualitas pekerjaan itu sendiri.

BPKSDM sebagai wakil pemerintah yang bertugas membina jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, menyadari akan kondisi NAD sejalan dengan waktu, pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan jasa konstruksi mulai menunjukkan keberadaannya secara berkesinambungan, diketahui bahwa pelaksanaan Jasa Konstruksi di daerah ini sudah berjalan dengan baik, meskipun masih berkondisi lambat dalam menyikapi berbagai kegiatan jasa konstruksi.

Penyebabnya adalah ada beberapa kabupaten yang lambat merespon dalam menyikapi penyesuaian dalam pemberlakuan Peraturan dan ketentuan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Disamping itu faktor rendahnya pemahaman terhadap penjabaran ketentuan dan peraturan yang perlu segera diimplementasikan. Meskipun demikian menurut Miswar, kondisi pelaksanaan jasa konstruksi saat ini telah



Pembinaan Jasa konstruksi yang telah dilakukan selama ini di daerah Propinsi NAD antara lain sosialisasi segala bentuk informasi peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi dan memberikan asistensi kepada pembina jasa konstruksi Kab/Kota, mengarahkan dan menjawab semua permasalahan jasa konstruksi di Kab/Kota. Kegiatan lain yang telah dilakukan oleh Pembina Jasa Konstruksi Provinsi NAD antara pada tanggal 20 Juli 2007 lalu mengadakan pertemuan sehari dengan para

mengalami kemajuan walaupun belum signifikan dengan program pemerintah Pusat.

Disisi lain hubungan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dengan Kab/Kota sudah sangat baik tapi hubungan dengan para *stake holder* lain, seperti asosiasi dan LPJKD masih sangat lemah. Kondisi tersebut disebabkan antara lain belum dipahaminya berbagai aturan tata tertib dan kebijakan jasa konstruksi, belum dimanfaatkannya wadah koordinasi yang telah dibentuk di provinsi maupun di Kab/Kota, sosialisasi yang belum menyeluruh terhadap pemberlakuan SBU dan IUJK, dan kurangnya pertemuan koordinasi

diharapkan secara terus menerus untuk melakukan sosialisasi kebijakan jasa konstruksi yang harus diimplementasikan di daerah dengan tim pembina provinsi maupun Kab/Kota dan stake holder lainnya. Disamping itu dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh berbagai elemen dalam pembinaan jasa konstruksi di Kab/Kota dapat memanfaatkan asistensi dengan Pembina Jasa Konstruksi Pusat melalui fasilitas akses internet *on line*.

Hubungan kerjasama Pemda dan masyarakat Jasa Konstruksi di daerah selama ini telah terbina melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Jasa

Konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas Perkotaan dan Permukiman Provinsi NAD, meskipun belum terlalu maksimal. Kerjasama tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat pembinaan jasa konstruksi memiliki tugas yang sangat luas. Oleh karena itu



antara Pembina jasa konstruksi Provinsi dengan kab/Kota serta dengan para asosiasi dan LPJK. Untuk memperbaiki kondisi tersebut Tim Pembina Jasa Konstruksi Pusat

perlu dibentuk suatu tatanan struktur organisasi yang berdiri sendiri diperkuat dengan beberapa bagian struktur yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

pembina jasa Konstruksi Kab/Kota se Prov NAD dengan agenda membahas dan menyikapi segala bentuk kebijakan dan permasalahan yang berkembang dalam pelaksanaan jasa konstruksi di Kab/Kota.

Hambatan yang dihadapi Pembina Konstruksi saat ini adalah belum optimalnya penggunaan sistem informasi melalui internet, sehingga untuk penyebaran informasi serta tanya jawab terhadap permasalahan jasa konstruksi di kabupaten/kota relatif cukup lama. Disamping itu, pemahaman terhadap ruang lingkup, tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi sangat terbatas. Melihat keadaan ini maka sangat perlu disediakan fasilitas media elektronik sistem informasi jasa konstruksi yang aksesnya dapat langsung ke Pembina Propinsi maupun Pusat. Untuk hal ini sangat diharapkan Pembina Pusat dapat mengupayakan alokasi dana melalui APBN untuk penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah.





BPKSDM Dep. PU kembali menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) bagi pegawai di lingkungan BPKSDM, Kamis (02/08/2007) sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan pegawai, terutama dalam menunjang pekerjaan.

Kegiatan SSS (*Student Support Service*) berlangsung selama 2 hari (27 Juli s/d 28 Juli 2007) di Kampus Dodik Bela Negara Cikole Lembang. Setelah itu dilanjutkan dengan Kegiatan MKUK Mata Kuliah Umum (Kedinasan) selama 1 minggu (30 Juli s/d 4 Agustus 2007) di Kampus Pusbikte Bandung.

Musyawarah Nasional Anggota LPJK dengan tema Reorientasi Kelembagaan & program LPJK Nasional di Hotel Sultan - Jakarta, 31 Juli 2007.



Berlokasi di Dep. PU, 11 Juli 2007 diadakan diskusi panel yang diselenggarakan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) dengan panelis dari Bappenas, Sekjen PU, Bina Marga, Cipta karya dan BPKSDM.



Galery Photo



Tanggal 11 Juli 2007, di Ruang Sapta Taruna Departemen PU dilantik 9 orang Pejabat. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 64/M/2007, Iwan Nursyirwan mengemban jabatan baru dari Kepala BPKSDM menjadi Direktur jenderal Sumber Daya Air. Sedangkan Kepala BPKSDM dijabat oleh Budi Yuwono yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya & Peran Masyarakat.



Pelantikan pejabat eselon III di lingkungan BPKSDM Dep. PU, tanggal 17/08/2007.



Keikutsertaan BPKSDM dalam Lomba Gerak Jalan dalam rangka menyambut HUT RI ke 62.



Keikutsertaan BPKSDM dalam Lomba Tumpeng dalam rangka menyambut HUT RI ke 62 di Dep. PU.

Dalam hal ini Ketua Badan Sertifikasi Anggota Provinsi NAD (BSAP-NAD) INKINDO, Gunawan, menilai bahwa belum ada persamaan pemahaman mengenai aturan-aturan tentang jasa konstruksi antara para pengguna dan penyedia jasa. Sedangkan mengenai lampiran-lampiran tentang PQ belum ada persamaan pemahaman sehingga para penyedia merasakan bahwa lampiran yang dipersyaratkan terlalu tebal .

Disisi lain pekerjaan di Aceh terdapat kekhususan akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu yang lalu, mengakibatkan paket-paket pekerjaannya cukup besar padahal jenis/kualitas pekerjaannya tidak terlalu memerlukan tenaga ahli yang banyak tapi karena harga paketnya besar sehingga yang dapat pekerjaan kontraktor-kontraktor kelas besar, misalnya pembangunan rumah tipe 36 dalam jumlah yang banyak .

Permasalahan lain yang timbul antara lain, sebagian asosiasi belum mendapatkan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, meski diakui sebagian telah memperoleh dari pemerintah daerah. Akan tetapi dari yang telah mendapat peraturan ternyata pemahaman diantara mereka masih berbeda, terutama mengenai aturan-aturan tentang penyelenggaraan jasa konstruksi antara pengguna dan asosiasi.

Dirasakan oleh Gunawan, Pemerintah Daerah masih kurang melakukan sosialisasi kepada asosiasi dan penyedia jasa. Harapannya ke depan perlu diadakan sosialisasi mengenai aturan-aturan tentang penyelenggaraan jasa



konstruksi secara komprehensif, sehingga semua pihak dapat memahaminya. Selain itu, Gunawan melihat Pemda dan LPJK belum sepaham, misalnya dalam hal melaksanakan aturan-aturan ternyata masih terdapat perbedaan istilah yang dikeluarkan oleh Perlem No.11 mengenai istilah kecil dan non kecil, kecil-menengah-besar. Akibatnya penentuan Gred rancu, misalnya Gred 4 yang bisa mengerjakan pekerjaan Gred 3. Padahal dalam hal ini yang besar diberikan keleluasaan sementara yang kecil dibatasi. Harapannya untuk pelaksanaannya agar lebih konsisten.

Kinerja pemerintah juga dianggap belum memuaskan, misalnya dalam hal *Fee* penyedia jasa yang digunakan sebagai acuan adalah KepMen nomor 332 (Cipta Karya-

nya yang menyebabkan tidak dapat diketahui berapa jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan. Untuk itu para asosiasi/ penyedia jasa khususnya di Aceh selalu kalah tender karena tenaga ahli di NAD masih kurang bila dibandingkan dengan tenaga yang dari Jakarta dan sekitarnya. Dibandingkan dengan adanya *short list* dianggap lebih baik.



untuk gedung) sedangkan untuk irigasi dan jalan belum ada aturannya padahal pelaksanaan pekerjaannya berbeda. Aturan tersebut diambil oleh BRR untuk pembangunan rumah –rumah di Aceh ,padahal rumah yang dibangun adalah rumah type kecil yang tentunya berbeda dengan pembangunan gedung-gedung besar.

Sementara itu pekerjaan supervisi/kontrak lump sum masih dirasa perlu ada aturan yang jelas, sebab PQ selama ini tidak mencantumkan TOR-

Sementara itu Peraturan Lembaga ternyata tidak segera disosialisasikan, padahal keberadaan LPJK diharapkan menjadi badan yang dapat mengembangkan asosiasi dibawahnya. Aspirasi daerah diharapkan untuk diakomodir dan jangan dipukul rata karena kemampuan tiap-tiap daerah sangat berbeda. Untuk itu pemerintah diminta mengakomodir dapat membuat aturan yang standart dan disampaikan ke Gubernur untuk ditindak lanjuti sebagai Peraturan Daerah Sementara itu, aturan yang dibuat juga dianggap tidak siap dijalankan. Diharapkan ada target jangka pendek dan jangka panjang agar dapat meningkatkan profesionalisme di segala bidang.



Penyedia jasa di NAD juga meminta Standard untuk APBN dan APBD disamakan, sebab yang terjadi kontrak lump sum sering terjadi biayanya tetap tetapi waktunya panjang sehingga penyedia jasa merasa dirugikan. Untuk hal ini Peraturan agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, mengingat kondisi NAD pasca gempa berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya untuk paket pekerjaan s/d 1 milyar sebaiknya tidak dipertandingkan antar provinsi, untuk pekerjaan diatas 1 M ditangani tingkat nasional sebaiknya tenaga ahli dari Jakarta dan sekitarnya namun untuk asistennya diupayakan dari daerah NAD sebagai proses pembinaan/pembelajaran.

Referensi yang diperlukan oleh pengguna jasa juga terkadang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia jasa sehingga menyebabkan kekalahan. Hal ini membutuhkan pembinaan dan sosialisasi yang lebih lagi. Pembinaan melalui *capacity* sangat dibutuhkan untuk memperpendek kesenjangan, mengingat peningkatan tenaga ahli di daerah diperlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu *short course* maupun *workshop* bagi tenaga-tenaga teknik untuk bidang pengairan, jalan dan jembatan; *workshop* mengenai pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM; pelatihan pembiayaan agar SDM daerah NAD bisa bersaing dalam bidang jasa konstruksi; serta manajemen proyek agar bisa ikut berperan dalam pelaksanaan pekerjaan BRR-NAD.

Melalui pembinaan dan pengawasan yang berbasis pada terlaksananya ketentuan yang berlaku, Nanggroe Aceh Darussalam akan bangkit kembali membangun puing-puing konstruksi yang telah porak-poranda dilanda bencana. Tentu untuk kembali bangkit tak hanya perlu tangan-tangan anak negeri Serambi Mekah ini sendiri namun lebih dari itu perlu dukungan tangan-tangan pemerintah baik pusat maupun daerah dan tentu saja seluruh aspek bangsa mendukung terlaksananya pembangunan kembali infrastruktur Aceh yang berkualitas. ♦ (tw/rn)

Silih Berganti Eselon II, III serta Balai di lingkungan BPKSDM

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Dep. PU Senin (06/08) di Jakarta. Pelantikan ini cukup berbeda mengingat jumlah pejabat yang dilantik mencapai 125 orang. Pada kesempatan tersebut Djoko Kirmanto berpesan kepada pejabat yang dilantik agar jabatan yang diterima jangan hanya dianggap sebagai hadiah atas prestasi namun lebih dari itu merupakan



tanggungjawab kepada negara yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pejabat di lingkungan Dep. PU yang dilantik terdiri dari 26 orang eselon II dan 99 orang eselon III, dimana 13 dari 26 orang eselon II melalui promosi, 50 orang dari 99 orang eselon III juga melalui promosi, sedangkan sisanya melalui rotasi. Di lingkungan BPKSDM Dep. PU sendiri pejabat yang dilantik terdiri dari : Eselon II: Ir. Frankie Tayu menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, dan Ir. Soekistiarto, Dipl.HE menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi.

Pejabat Eselon III di lingkungan BPKSDM antara lain: Ir. Chairul Abubakar, M.Sc menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Jasa Konstruksi Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi; Ir. Djoko Prakosa, ME menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi Kontrak Konstruksi Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi; Ir. Sudrajat, Dipl. SE menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Keahlian Konstruksi Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi; Dra. Yuni Emi Aguslin, M.Si menjabat sebagai Kepala Bagian TU Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan



Konstruksi; dan Nugroho Purwanto, SE, MM menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan Ketrampilan Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi.

Sedangkan pejabat Eselon III pada Balai di Lingkungan BPKSDM antara lain sebagai berikut: Ir. Johansyah Masdar, BE, S.Sos, M.Si menjabat sebagai Kepala Balai Peningkatan Keahlian Teknik Konstruksi ke-Pu-an Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi; Ir. Supangat, M.Eng menjabat sebagai Kepala Balai Pelatihan Peralatan Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; Aca Ditamiharja, ME menjabat sebagai Kepala Balai Pelatihan Jasa Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan



Konstruksi; dan Ir. Sumihar Simamora, CES menjabat sebagai Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Jakarta Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi.

Esok harinya (07/08) dilangsungkan Serah Terima Jabatan Eselon II & III BPKSDM dan mengukuhkan 11 untuk orang mengemban tugas yang baru.

Pada kesempatan tersebut, Budi Yuwono selaku Kepala BPKSDM mengingatkan kembali peran BPKSDM. ♦ (Tw/Mh)

Menggapai Totalitas

Pembangunan Konstruksi di Kepulauan Riau

Pekerjaan konstruksi yang berkualitas membutuhkan kelengkapan unsur pelaksana yang menjadi faktor pendukungnya. Undang-Undang Jasa Konstruksi sendiri menyebutkan bahwa untuk setiap pekerjaan jasa konstruksi harus ada 3 (tiga) unsur penyedia jasa. Yang pertama harus ada penyedia jasa Manajemen Konstruksi atau Pengawas Konstruksi; kedua, penyedia jasa Perencana Konstruksi; dan ketiga, penyedia jasa Pelaksana Konstruksi. Khusus untuk penyedia jasa Manajemen Konstruksi dipilih dengan cara pelelangan umum sehingga nantinya akan di dapat konsultan Manajemen Konstruksi yang berkualitas.

Namun melaksanakan sebuah prinsip untuk mendapatkan kualitas hasil yang sempurna tak selamanya berjalan mulus. Ada banyak hal yang dipertimbangkan bahkan dipertanyakan untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut. Salah satunya adalah kebijakan pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan beberapa kegiatan strategis lainnya yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Tahun Jamak, yang mendapat sorotan beberapa anggota DPRD Propinsi Kepri terutama mengenai jumlah biaya dan rincian penggunaannya.

Menanggapi dipertanyakannya kebijakan penerapan manajemen konstruksi, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah di depan sidang paripurna DPRD Provinsi Kepri pada bulan Juni yang lalu menyampaikan bahwa biaya yang dianggarkan untuk membayar jasa konsultan Manajemen Konstruksi tersebut dihitung dari perkiraan total pembiayaan seluruh proyek tahun jamak. Perhitungannya berdasarkan "Billing Rate" Bappenas atau berdasarkan komponen harga satuan dari setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Jumlah biaya Manajemen Konstruksi berdasarkan

perhitungan tersebut jauh lebih murah yakni 1,2% dari total pembiayaan tahun jamak, dibandingkan apabila menggunakan perhitungan berdasarkan Tabel Kepmen Kimpraswil Nomor 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002, yakni 1,84%.

Selain itu, Ranperda Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Tahun Jamak dimaksudkan bukan saja untuk mengatur pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak tetapi juga untuk beberapa kegiatan pembangunan di luar Pulau Dompak seperti Pengembangan Bandara Kijang dan Pembangunan Rumah Sakit di Tanjungpinang serta Pembangunan Kantor Dispenda di Batam. Hal ini menunjukkan besarnya cakupan pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan dan terutama menyangkut penyediaan sarana prasarana pelayanan masyarakat.

Sementara itu, program kegiatan pembangunan tahun jamak yang akan dilaksanakan antara lain meliputi Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Kepri terdiri dari Kantor DPRD, Kantor Gubernur dan Kantor Dinas/Badan; Universitas Negeri; Sport Center (Gelanggang Olahraga); Rumah Sakit Umum Provinsi di Tanjungpinang dan Medical Center (Klinik) di Pulau Dompak; Masjid Raya, Gedung Kesenian, dan Gedung Lembaga Adat; Jalan dan Jembatan; Pertamanan, Tempat Pejalman Kaki, dan Lampu Jalan; Utilitas Pulau Dompak (jaringan listrik, air, telepon, gas);

Rumah Jabatan Pemprov dan Rumah Dinas DPRD (sesuai rekomendasi Depdagri); Ferry Terminal; Pengembangan Bandara Kijang; dan Pembangunan kantor Dispenda Provinsi Kepri.

Pengikatan dan penetapan program kegiatan tahun jamak untuk setiap kegiatan pembangunan melalui Peraturan Daerah adalah sangat penting dilakukan guna menjamin ketersediaan pembiayaan pembangunannya. Selain itu dilihat segi kualitas dan waktu, pengerjaan pembangunan lebih baik dan cepat karena masing-masing pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh satu kontraktor dari tahap awal sampai dengan akhir pekerjaan. Penghematan yang terjadi adalah waktu pembangunan lebih cepat karena cukup pelelangan satu kali untuk setiap proyek pembangunan dan mutu pekerjaan menjadi lebih baik karena tidak berganti-ganti pelaksana pembangunannya.

Sedangkan jumlah besaran biaya yang dianggarkan untuk setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui pola tahun jamak tersebut merupakan estimasi harga tertinggi yang realisasinya akan didasarkan pada hasil pelelangan terbuka. Kepastian besaran harga setiap kegiatan pembangunan tersebut baru dapat ditentukan setelah Master Plan dan Design Engineering Detail (DED) selesai disusun. Dalam pembahasan Ranperda selanjutnya, akan disepakati bersama formulasi apa yang akan dipergunakan untuk menetapkan besaran biaya setiap kegiatan pembangunan tahun jamak tersebut. Apakah dalam perda nanti akan dicantumkan nilai ataupun prosentase dari kegiatan pembangunan tahun jamak, tentunya akan bersama-sama dicari solusi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Menanggapi pandangan Dewan tentang proyeksi pendapatan daerah sampai dengan tahun 2010 yang menyarankan agar memperkirakan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan tahun jamak untuk tidak mengabaikan kepentingan kegiatan pembangunan yang lainnya. Atas pandangan Dewan tersebut, Gubernur Kepri menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi telah menyusun proyeksi rencana penerimaan daerah untuk 3 (tiga) tahun mendatang yang diperkirakan mengalami kenaikan rata-rata 15% pertahunnya. Suatu kenaikan yang sangat konservatif atau cukup hati-hati, mengingat kenaikan tahun-tahun sebelumnya yakni 31% dari tahun 2006 ke 2007, dan kenaikan sebesar 137% dari tahun 2005 ke 2006.

Proyeksi kenaikan di tahun-tahun mendatang tersebut dimungkinkan karena adanya penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi yang tergabung dalam Forum Provinsi Kepulauan serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor sebagai akibat dari Intensifikasi dan Ekstensifikasi untuk menambah jumlah pajaknya. Disamping itu juga diperkirakan dari Dana Perimbangan khususnya dari Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas, serta kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non-DR). Kenaikan DAK non-DR dimungkinkan karena mulai tahun 2007 alokasi tersebut sudah dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur provinsi, setelah sebelumnya hanya diperuntukkan untuk kabupaten/kota. Berdasarkan proyeksi diatas tersebut, hampir seluruh komponen penerimaan diperkirakan akan mengalami peningkatan baik Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan. Sedangkan Pendapatan Lain-lain yang sah peningkatannya menyesuaikan dengan kemajuan keuangan negara serta kondisi dan kebutuhan daerah. Dari proyeksi APBD tersebut jumlah dana yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan tahun jamak rata-rata tiap tahunnya adalah 26%. Dengan demikian sisanya sebesar 74% masih mencukupi untuk membiayai kegiatan pendidikan 20%, dan selebihnya 54% masih cukup untuk membiayai aparatur, pelayanan dasar kesehatan, usaha kecil, pembinaan pedesaan, pariwisata, infrastruktur lainnya, ekonomi, sosial budaya, keagamaan, dan lain-lain.

Selain itu, peluang untuk meningkatkan penerimaan juga dimungkinkan melalui Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi (DAK non DR). Hal tersebut dimungkinkan karena konsep dari DAK non DR adalah untuk membangun sarana dan prasarana Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat, yang saat ini dana tersebut dititikberatkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun sesuai dengan arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 14 Juni 2007 di Manado pada acara Raker Forum Provinsi Kepulauan se-Indonesia bahwa mulai tahun 2008 DAK non DR selain untuk pembangunan infrastruktur Kabupaten/Kota juga akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pada Provinsi. Ditambah lagi Menteri PPN/Kepala Bappenas di Manado juga sudah memberikan indikasi kenaikan DAU bagi provinsi kepulauan karena dalam perhitungan DAU sudah akan dimasukan indeks kelautan.

Menanggapi pandangan Dewan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan biaya pemotongan bukit di Bandara Kijang, dijelaskan oleh Ismeth Abdullah bahwa RPJMD sebagai tolok ukur pembangunan tersebut sudah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2005. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan oleh karena itu sebagai dasar rujukannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana penetapan RPJMD dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen RPJMD itu sendiri sudah disampaikan kepada DPRD pada akhir tahun 2005 yang lalu.

Sedangkan berkenaan dengan biaya pemotongan bukit dalam rangka pengembangan Bandara Kijang dijelaskan bahwa Kegiatan Pengembangan Bandara Kijang Tanjungpinang dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pelayanan operasional penerbangan tidak dapat dilakukan secara optimal karena pada ujung landasan pacu terdapat bukit yang merupakan penghalang tetap (*fixed obstacle*) dengan volume lebih kurang 3.414.958 m³. Untuk menghilangkan penghalang tetap tersebut, harus dilakukan pemotongan bukit secara bertahap yaitu pada tahun anggaran

2006 telah dilakukan pekerjaan pemotongan bukit lebih kurang 537.031 m³ dengan dana APBD Kepri sebesar Rp.9.952.000.000,-. Pemotongan bukit tahap pertama tersebut sudah selesai dikerjakan. Sedangkan pemotongan bukit tahap II memerlukan dana lebih kurang 58 Milyar yang dianggarkan dari APBD Provinsi Kepri TA.2007 dan 2008 (bagian dari program kegiatan tahun jamak). Biaya tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pekerjaan umum, drainase, pekerjaan tanah, dan pekerjaan struktur.

Untuk meningkatkan pelayanan jasa penerbangan di Bandara Kijang, berdasarkan kesepakatan telah dilakukan kesepakatan antara Departemen Perhubungan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan PT (Persero) Angkasa Pura II untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas Bandara Kijang. Departemen Perhubungan melalui dana APBN Tahun 2007 sebesar Rp.35 milyar akan membangun infrastruktur sisi udara yaitu berupa perpanjangan landasan pacu dari 1.850 M menjadi 2.250 M, pelebaran landasan pacu dari 30 M menjadi 45 M, pelapisan (*over lay*) landasan pacu, *taxi way* dan *apron*. Sedangkan pihak PT (Persero) Angkasa Pura II bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur sisi darat yaitu berupa fasilitas terminal, perkantoran, menara pengawas, pemadam kebakaran, area parkir dan lain-lain.

Direncanakan sebelum akhir tahun 2007 sudah akan dilakukan penerbangan perdana yang akan melayani rute Jakarta - Tanjungpinang (PP). Ada 4 (empat) perusahaan penerbangan yang berminat untuk melayani rute tersebut, yaitu : PT. Sriwijaya Air, PT. Kartika, PT. Merpati Nusantara, dan PT. Mandala Airlines. Membangun bangsa melalui pembangunan infrastruktur tidak bisa dan tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Kualitas pembangunan akan menentukan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karenanya, prinsip pekerjaan jasa konstruksi harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi dengan dukungan dan partisipasi dari semua pihak. ♦ (twinn)

Diolah dari sumber www.ri.go.id tanggal 29/06/07 dengan judul artikel "Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri"

Good Governance Dalam Perspektif Islam

Oleh : Doedoeng Z. Arifin *)

“..... karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Alquran 28: 26).

“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya salat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat” (Nabi Muhammad saw, Bihar al-Anwar 75: 114).

Sejak dulu kejujuran dipandang sebagai kualitas manusiawi dalam praktik-moral sehari-hari. Di hadapan kepentingan sesaat, ia acap berperan sebagai sikap protes. Kejujuran dan kepentingan (apalagi politis) selalu bertubrukan dan saling meniadakan. Kemenangan salah satunya lebih ditentukan kadar idealisme individu. Makin tipis, rapuh, dan pragmatis, pilihannya pasti jatuh pada kepentingan, vice versa. Namun, faktanya, kejujuran sering dikalahkan oleh kepentingan.

Pada tahun 38 H, khalifah Islam yang keempat Ali bin Abi Thalib mengangkat Malik al-Asykar sebagai Gubernur Mesir. Semula Malik menduduki jabatan gubernur di Nashibin, sebuah daerah kecil yang tidak sekaya Mesir. Imam Ali sangat mencintainya karena keluhuran akhlaknya. Ia sangat taat beribadat, sangat tekun berjihad, dan sangat bersabar menghadapi rakyat. “Kedudukan dia bagiku sama seperti kedudukan aku bagi Nabi Allah saw,” kata Ali memujinya.

Seperti Ali, ia piawai dalam memainkan pedang. Di medan pertempuran, ia bukan saja tidak pernah mundur, tetapi juga tidak pernah kalah. Namanya saja sudah cukup menggentarkan nyali musuh-musuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti Ali, ia bukan saja sabar menghadapi

“kenakalan” rakyatnya, tetapi juga sangat cepat memberikan maafnya.

Ketika ia menjabat Panglima Angkatan Bersenjata dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia berjalan melewati pasar. Pakaianya sangat sederhana, terbuat dari katun yang kasar. Melihat pakaiannya yang kumuh, seorang penjaga toko melemparinya dengan dedaunan kotor, sekadar mencemoohkannya. Ia mengacuhkan penghinaan itu. Menoleh pun tidak. Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Orang yang mengenal Malik menegur penjaga toko itu? “Tahukah kamu, siapa yang telah kamu perlakukan dengan tidak senonoh itu?”

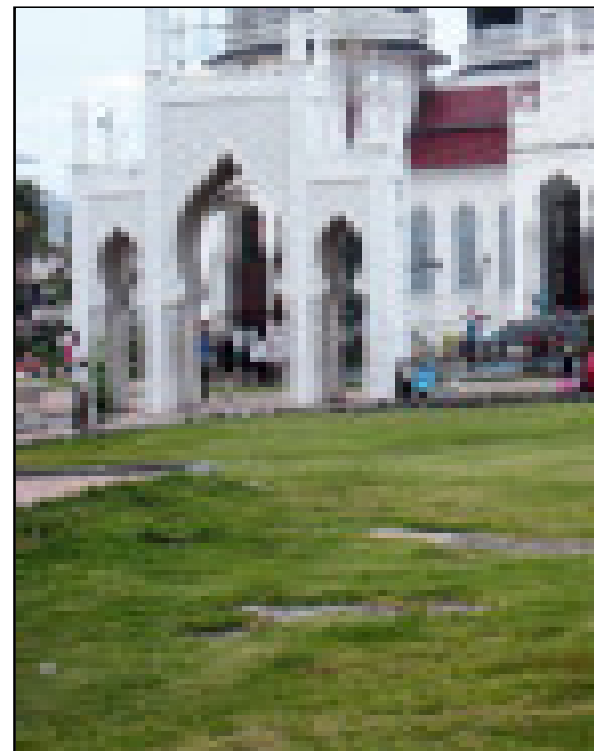
Ketika disebut nama Malik bin Asykar berguncanglah seluruh sendi tubuhnya. Dengan ketakutan yang amat sangat, ia mengejar Malik dan mendapatkannya sedang berdoa di masjid. Setelah Malik selesai berdoa, ia menjatuhkan dirinya, berlutut memohon ampun atas kelakuannya yang buruk. Ia menangis terisak-isak. Malik mengangkat dagunya dan berkata, “Demi Allah, aku datang ke masjid untuk berdoa semoga Allah mengampuni kamu!”

Dengan akhlak yang begitu mulia, Malik segera mendapat kepercayaan Imam Ali. Ia mendapat SK sebagai gubernur dan sekaligus petunjuk administratif menjalankan pemerintahan yang baik,

good governance. Inilah, saya kira dokumen peraturan pemerintah daerah yang pertama dalam Islam.

Dengan nama Allah yang Mahakasih Mahasayang.

Inilah yang telah diperintahkan oleh hamba Allah Ali Amirul Mukminin kepada Malik bin Al-Harith Al-Asykar dalam perjanjian atasnya ketika ia mengangkatnya sebagai Gubernur Mesir untuk mengumpulkan



pajak, memerangi musuh negara, menjejahterakan penduduk, dan memakmurkan negeri.

Angkatlah para pejabat Anda setelah melalui proses pengujian, janganlah sekali-kali memilih orang karena ikatan kasih sayang atau hubungan pribadi, karena keduanya merupakan sumber kezaliman dan pengkhianatan. Pilihlah di antara mereka orang-orang yang berpengalaman dan memiliki harga diri dari keluarga yang terkenal kesalehannya dan keutamaannya di dalam Islam. Mereka adalah orang yang paling mulia akhlaknya, paling bersih reputasinya, paling sedikit kerakusannya, dan paling konsekuen dalam menjalankan urusannya.

Kemudian berilah mereka gaji yang banyak karena gaji itu akan memperkuat mereka dalam memperbaiki diri mereka dan mencukupi keperluan mereka sehingga tidak memanfaatkan apa yang berada dalam tanggung jawab mereka. Selain itu, gaji itu akan menjadi argumentasi yang kuat untuk mendakwa mereka jika mereka menentang perintahmu atau menyelewengkan amanatmu.

Kemudian awasi pekerjaan mereka. Bentuklah tim pengawas dari orang-orang yang jujur dan setia karena pengawasan Anda akan mendorong mereka untuk menjalankan amanat secara setia dan menyayangi rakyat. Berhati-hatilah dengan

para pejabatmu. Jika salah seorang di antara mereka menjulurkan tangannya untuk berkhianat dan para pengawasmu sudah mengukuhkan penyelewengannya, cukuplah itu sebagai bukti.

Anda harus memberikan hukuman badan kepadanya dan mengembalikan dana yang sudah diselewengkannya. Kemudian Anda harus menempatkannya pada keadaan yang memalukan, memasukkannya dalam daftar hitam pengkhianatan, dan melingkarkan di lehernya kalung kejahatan.

Pendekatan individual dan sosial

Di antara petunjuk Imam Ali dalam dokumen di atas kita menemukan pentingnya memilih pejabat yang memiliki akhlak yang mulia dan reputasi yang terhormat. Mereka juga harus terkenal tidak serakah atau tamak dalam mengejar kekayaan. Semua itu dilakukan agar mereka tidak mengambil hak rakyat untuk kepentingannya sendiri. Dengan kata-kata Imam Ali, "supaya mereka dapat memelihara diri agar tidak mengambil dana yang mereka kelola" untuk kepentingan pribadi.

Tetapi karakter yang baik saja tidak menjamin kejujuran. Imam Ali juga menegaskan pentingnya sistem kontrol atau pengawasan yang tidak memberikan peluang kepada para pejabat untuk melakukan penyalahgunaan. Sistem kontrol atau pengawasan ini harus dilakukan dengan sangat tegas. Ia harus didukung oleh law enforcement yang tidak pandang bulu. Kata Imam Ali, "Anda harus memberikan hukuman badan kepadanya dan mengembalikan dana yang sudah diselewengkannya. Kemudian Anda harus menempatkannya pada keadaan yang memalukan, memasukkannya dalam daftar hitam pengkhianatan, dan melingkarkan di lehernya kalung kejahatan."

Walhasil, dalam perspektif Islam, pemecahan untuk penyalahgunaan dana rakyat harus dilakukan dengan pendekatan individual dan sosial sekaligus. Pendekatan individual dilakukan dengan mensyaratkan dua nilai dasar yang harus dimiliki oleh para pejabat: kemampuan (competency, proficiency, expertise) dan kejujuran (integrity, trustworthiness, truthfulness). Dalam Islam, kejujuran itu

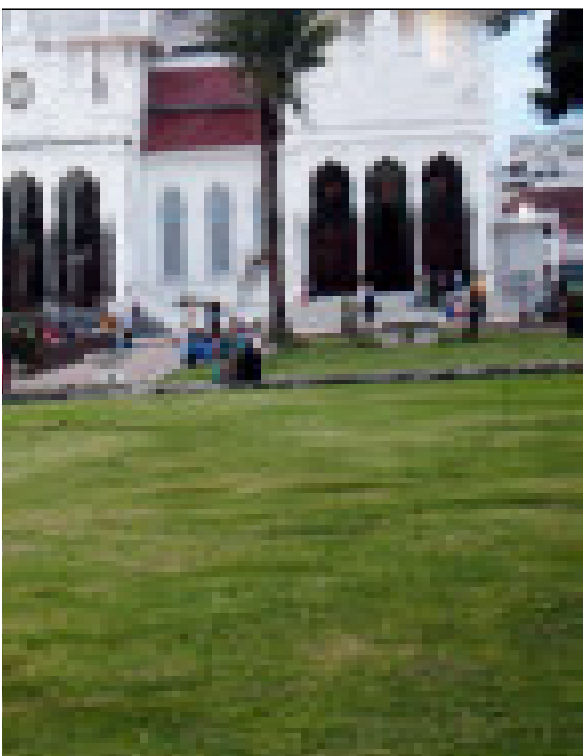
diungkapkan dalam dua nilai utama, yang menjadi sifat wajib bagi para Nabi. Dua nilai utama itu disebut sebagai nilai profetis, bahkan ilahi. Pemeliharaan kedua nilai itu dipandang sebagai lebih utama dari melakukan ibadah-ibadat ritual seperti salat, saum, dan haji. Kedua nilai itu adalah shidq dan amanat.

Pendekatan sosial dilakukan dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya pengawas dari masyarakat. Kontrol sosial ini harus ditanggapi oleh pihak pemerintah dengan segera. "Apabila ada pejabat yang menggerakkan tangannya untuk melakukan penyelewengan, dan laporan banyak pelapor sudah mengukuhkannya, itu harus dianggap sebagai bukti yang cukup," kata Imam Ali.

Pada masa kini, tak mudah menemukan model kejujuran dalam arti penuh dan total. Kecuali *figur the chosen one* dan diberkahi Tuhan. Manusia selalu dicerai ketidakjujuran dalam hidupnya. Terlepas dari konteks metafisisnya, ketidakjujuran muncul sepanjang proses pengalaman, koeksistensi, dan interaksi antarindividu. Fenomena ini umumnya berbentuk reaksi (biasanya refleksi) atas stimulasi dan kondisi yang melingkupi dan mengimpit. Sejenis mekanisme pertahanan diri dalam bahasa psikologi.

Ketidakjujuran adalah sikap mengaburkan (atau kabur dari) kenyataan demi mengelak dari tekanan dan mengubur rasa cemas. Dalam bahasa Heideggerian, sikap ini tergolong tidak otentik. M. Scott Peck dalam *People of the Lie* menunjukkan salah satu gejala ketidakjujuran, yakni menyerang dan mengorbankan lainnya ketimbang menghadapi kekeliruan dan kegagalannya sendiri. Kecenderungan ini muncul dari hasrat melindungi citra kesempurnaan dirinya. Sementara kejujuran adalah *eidos (spirit, esensi)* yang menyembul, lalu meresapi, sejujur jiwa seseorang sebagai produk beragam faktor (pendidikan, lingkungan, dan olah batin). Istilah Arabnya, malakah. Karena itu, dikotomi aksi-reaksi tidak relevan dalam pemaknaan ini. Di sini, ketidakjujuran dimaknai sebagai absennya kejujuran. Saat kejujuran dipasung, saat itu pula ketidakjujuran menggejala. Keduanya ibarat malam dan siang hari yang tak pernah bertemu di satu titik cakrawala. Pertanyaannya, apakah sekarang siang atau malam hari? ♦ (dza 0607)

Penulis adalah Kasubag Evaluasi dan Monitoring, Sekretariat BPKSDM

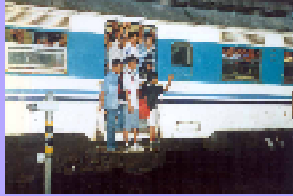


Motivasi Motif

Salah satu rutinitas kita yang hidup di Jakarta. Pagi hari menyusuri kota, sampai ditempat kerja, melakukan

aktivitas. Sorenya kembali menyusuri jalan kembali ke rumah. Pertanyaan saya kali ini: berapa jam dalam satu hari waktu yang diperlukan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya? Kalikan untuk satu minggu, satu bulan bahkan tahun. Berapa biaya dan energi yang kita keluarkan?

Charles Sugiono, 46 tahun menjelaskan bagaimana dia melakukan aktivitasnya tiap hari. Rumah di Bogor, kerja di Jakarta. Tiap hari setidaknya 5 jam waktu yang dihabiskan untuk perjalanan dari rumah ke kantor, pulang pergi, waduh berat terasa, melelahkan dan kadang happy kadang dengan beban yang tidak kunjung selesai tapi itu sebuah rutinitas yang harus ditempuh demi memperjuangkan tugas dan dapur yang harus ngebul.



Keberadaan kota satelit sebagai komunitas mandiri, berperan besar karena banyak dari penduduknya tergantung dengan kehidupan di kota besar. Yang saya bicarakan disini tentang DKI Jakarta dan sekitarnya, contohnya Depok, Tangerang, Bekasi dan Serpong.

Cempaka, 25 tahun bahkan kost di Jakarta untuk me-cut jarak tempuh tersebut. Dari tempat kost ke tempat kerjanya, alhasil sekitar 2 jam tiap hari sudah rutinitasnya untuk membelah Jakarta.

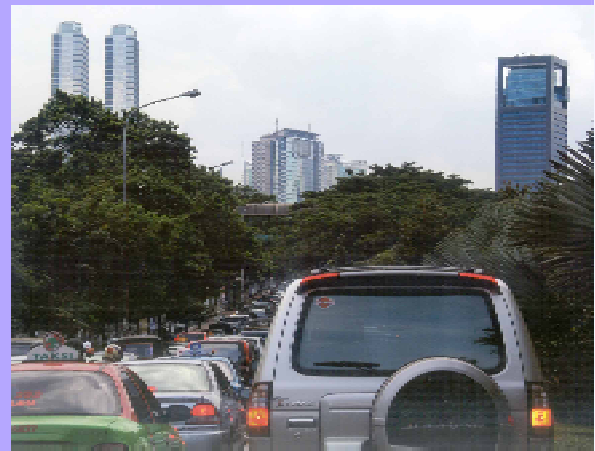
Jarak dan waktu seringkali kita coba akali dengan teknologi. HP, email, chating, fax adalah beberapa contoh alat yang dipakai dalam interaksi manusia satu dengan lainnya. Teknologi yang membawa kemudahan tersebut menciptakan budaya manusia di kota besar yang semakin cepat, kompetitif dan efisien.

Setiap orang punya motivasi tersendiri, mencoba mengingat teori kebutuhan maslow: entah itu untuk kebutuhan dasar mereka, kebutuhan rasa aman dan tentram, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk dihargai

Human Interest

dan aktualisasi diri. Apa motivasi anda? Jadikan kreativitas anda mendobrak permasalahan yang ada.

Dalam menyikapi jarak dan waktu, kembali kepada diri masing-masing, apa sebetulnya goal kita tiap hari dalam aktivitas. Apa saja yang telah kita korbankan. Apa manfaat yang kita petik untuk maju dalam karya dan kehidupan kita, apakah hari ini lebih baik daripada besok apakah besok lebih baik hari lusa, senantiasa langkah menuju tugas menghasilkan hasil dan karya yang diharapkan orang banyak, Sudahkah itu terjawab? ♦ (MH)



Lomba Tukang dan Mandor; Lomba Foto Konstruksi; Lomba Jurnalis/Karya Tulis; Lomba Karya Ilmiah terkait dengan Konstruksi; Lomba Karya Konstruksi; Lomba Kinerja Badan Usaha Konstruksi; Buku Konstruksi 2007.



**Departemen PU
Badan Pembinaan Konstruksi
dan Sumber Daya Manusia**

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
Telp : (021) 7266639
email : datinfo25@yahoo.com
website : www.pu.go.id

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.